



Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients

Dinamika Hubungan Partai Politik dan Budaya *Patron Client*

Anita Firdausul Husen

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Correspondence: anitahusaeni@gmail.com

ABSTRACT

The relationship between political parties and patron-client culture in Indonesia has quite complex dynamics. These dynamics are influenced by various factors, including social, economic, and political factors. At the social level, patron-client culture is still quite strong in Indonesian society. This is caused by factors such as poverty, economic inequality, and low levels of education. At the economic level, rapid economic development can improve people's welfare and reduce people's dependence on political parties. However, uneven economic development can increase economic inequality and worsen patron-client culture. At the political level, an undemocratic political system can make it easier for political parties to take advantage of patron-client culture to seize power. Conversely, a democratic political system can limit patron-client practices in politics. The relationship between political parties and patron-client culture has complex impacts, both positive and negative. The positive impact of this relationship is that it can increase people's political participation. The negative impact of this relationship is that it can damage the political system, because it can lead to corruption, collusion, and nepotism. To overcome the negative impacts of this relationship, efforts are needed to strengthen a democratic political system. In addition, efforts are also needed to improve people's welfare and reduce economic inequality.

Keywords: Political Parties; Democracy; Patron Clients

ABSTRAK

Hubungan antara partai politik dan budaya patron-client di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks. Dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial, ekonomi, dan politik. Pada tingkat sosial, budaya patron-client masih cukup kuat di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Pada tingkat ekonomi, perkembangan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat kepada partai politik. Namun, perkembangan ekonomi yang tidak merata dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan memperparah budaya patron-client. Pada tingkat politik, sistem politik yang tidak demokratis dapat mempermudah partai politik untuk memanfaatkan budaya patron-client untuk meraih kekuasaan. Sebaliknya, sistem politik yang demokratis dapat membatasi praktik patron-client dalam politik. Hubungan antara partai politik dan budaya patron-client memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Dampak positif hubungan ini adalah dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dampak negatif hubungan ini adalah dapat merusak sistem politik, karena dapat mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengatasi dampak negatif hubungan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem politik yang demokratis. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Kata Kunci: Partai Politik; Demokrasi; *Patron Client*

Received: 5 Agu 2024; Revised: 14 Agu 2024; Accepted: 14 Agu 2024; Available Online: 16 Agu 2024

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Penelitian mengenai hubungan patron-client dalam konteks partai politik di Indonesia telah banyak dibahas, terdapat beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini diantaranya penelitian ([Mutawalli et al.,](#)

2023) membahas dinamika patron-client dalam konteks representasi politik. Mereka menyoroti bagaimana patron-client membentuk hubungan antara partai politik dan konstituen, serta bagaimana hal ini berdampak pada representasi politik yang sering kali tidak optimal, juga penelitian Memberikan wawasan mendalam tentang hubungan patron-client tradisional. Namun, studi ini cenderung mengabaikan aspek digitalisasi dalam transformasi hubungan patron-client. Karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam "Patronage Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Dynamics in Indonesia". Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana praktik patron-client dibangun melalui distribusi manfaat material seperti uang dan barang untuk memperoleh dukungan pemilih, terutama dalam konteks pemilihan umum. Mereka menemukan bahwa meskipun Indonesia telah berupaya membangun demokrasi yang lebih substansial, clientelism tetap menjadi praktik dominan, terutama di daerah dengan infrastruktur politik yang lemah (Bakker, 2021). Selain itu, penelitian Diego Fossati dalam "From Patronage to Clientelism: The Changing Political Culture in Indonesia" menganalisis pergeseran dari patronage tradisional ke clientelism yang lebih terstruktur di politik modern Indonesia. Fossati menunjukkan bagaimana partai politik dan elit politik beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan melalui jaringan patron-client yang semakin kompleks, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Kedua penelitian ini memberikan landasan teoretis dan empiris yang kuat untuk memahami konteks, evolusi, dan dampak hubungan patron-client di Indonesia, yang menjadi dasar penting bagi analisis dalam studi ini (Aspinall, 2015).

Studi pada Partai Modular membahas bagaimana hubungan patron-client dipengaruhi oleh struktur partai yang lebih modular, di mana fungsionaris partai tidak lagi memegang massa dengan kuat. Studi ini menunjukkan bahwa struktur partai yang lebih fleksibel dapat mengurangi ketergantungan pada patron-client tradisional, Menawarkan perspektif baru tentang struktur partai politik dan pengaruhnya terhadap patron-client, namun juga berisiko melemahkan kohesi partai, Studi ini tidak mengkaji dampak langsung dari transformasi ini terhadap keterlibatan pemilih muda dan digitalisasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam tentang dinamika hubungan antara partai politik dan budaya patron-client. Dengan menganalisis hubungan ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana partai politik memanfaatkan koneksi personal dan pertukaran keuntungan untuk mempertahankan basis dukungannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari hubungan ini terhadap stabilitas politik suatu negara.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dinamika hubungan antara partai politik dan budaya patron-client di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mendalami fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu, memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai praktik patron-client dalam hubungan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang bertujuan untuk mengajukan kandidat dalam pemilihan umum dan memenangkan kursi untuk mewakili pandangan politik dan kepentingan kelompok atau masyarakat tertentu.

Salah satu pilar demokrasi, yaitu partai politik, seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan politik yang lebih baik. Partai politik diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Namun, kenyataannya, peran partai politik tidak selalu sejalan dengan fungsi yang seharusnya. Partai politik sering kali dianggap lebih sebagai masalah daripada solusi bagi proses demokratisasi. Jika demokrasi dipahami sebagai proses dan alat kontrol yang mengikat masyarakat melalui keputusan kolektif dalam berbagai isu publik, maka representasi menjadi syarat utama. Pemilu adalah salah satu mekanisme demokrasi yang diyakini dan diharapkan banyak pihak dapat menjadi alat untuk mengagregasikan kepentingan warga negara secara damai. Partai politik (parpol) sebagai institusi demokrasi karenanya menjadi penting sebagai lembaga representative yang mewakili kepentingan konstitusinya. Secara konstitusional keberadaan parpol mengungkapkan kesetiakwanan diri dan keterlibatan aktif dalam peningkatan keadilan dan

kesejahteraan di kalangan rakyat jelata. Dalam ajang perpolitikan, parpol berperan sebagai radar yang menangkap, menyergap, serta mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat (Susilawati, 2023).

Eksistensi partai politik dalam agenda demokrasi prosedural seperti pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan *government by discussion*, dalam konsep ini partai politik memiliki posisi sentral dengan uraian sebagai berikut: *Tahap Pertama*, setiap parpol bertanggungjawab menyerap, memformulasikan, dan mempertajam pendapat publik melalui mekanisme internal. Para tokoh partai harus mampu menjadikan partainya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan aspirasi dan tuntutan. Parpol juga harus dapat merumuskan aspirasi publik menjadi program partai. *Tahap kedua* program dari partai politik tersebut kemudian dipresentasikan dan dikampanyekan kepada para pemilih, terutama oleh calon anggota legislatif yang didukung. Pemilih memiliki kesempatan untuk menganalisis dan membandingkan program-program yang diajukan oleh setiap partai. Pemilih akan mengevaluasi program partai yang paling sesuai dengan aspirasi dan tuntutan mereka, serta yang dianggap sebagai solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Tahapan ini merupakan perluasan diskusi yang semula dilakukan internal masing-masing parpol, serta pada akhirnya menentukan partai dan calon yang akan dipilih. Setelah Pemilu, diskusi berlanjut ke tahap ketiga, yang memasuki ranah penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Semua anggota legislatif, baik dari partai mayoritas maupun minoritas, akan berusaha mengharmonisasikan agenda. Mereka juga akan menyelarasikannya dengan program partai yang didukung melalui proses diskusi dalam perumusan undang-undang dan kebijakan publik. Dalam proses ini tentu saja partai mayoritas memiliki kekuatan lebih besar, sehingga program partai inilah yang paling berpotensi menjadi kebijakan negara. *Pada tahap keempat*, partai kecil atau yang tidak memenangi pemilu tetap memiliki peran penting. Mereka berperan mengkritisi kebijakan negara dan pemerintahan, serta dapat memberikan rekomendasi berdasarkan program partainya sendiri. Proses ini bertujuan untuk menjaga penyelenggaraan negara dari penyimpangan dan penyalahgunaan, serta menajamkan perdebatan publik, sehingga tidak hanya mewakili aspirasi dan kepentingan mayoritas (Susilawati, 2023).

Kedudukan strategis partai politik tersebut disadari sangat menentukan kelangsungan hidup orang banyak melalui kebijakan publik atau kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu untuk menciptakan proses-proses yang mencerminkan kehendak rakyat, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi pada proses pelebagaan partai politik haruslah tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri yakni dengan menjunjung tinggi daulat rakyat yang telah terlembaga itu (Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, 2023).

Peran politik dalam sistem demokrasi sangat penting karena demokrasi bergantung pada partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Beberapa peran politik kunci dalam sistem demokrasi diantaranya, Representasi Rakyat Partai politik dan pemimpin terpilih berfungsi sebagai perwakilan warga negara, Mereka membawa suara dan kepentingan masyarakat ke dalam lembaga legislatif untuk diwakili dalam proses pembuatan keputusan, Partisipasi Pemilih Masyarakat memiliki peran aktif dalam memilih pemimpin dan partai politik melalui pemilihan umum, Partisipasi pemilih menciptakan legitimasi bagi pemerintahan dan mencerminkan kehendak rakyat, Pembuatan Kebijakan Politisi dan partai politik berperan dalam menyusun, memperdebatkan, dan mengesahkan kebijakan, Melibatkan proses dialog dan diskusi untuk mencapai konsensus atau mayoritas terkait kebijakan tertentu, Kontrol Terhadap Pemerintah Lembaga legislatif berperan dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan, Oposisi politik memiliki peran penting dalam memeriksa dan menyeimbangkan kebijakan pemerintah, Pengawasan Terhadap Keadilan Politisi dan lembaga hukum terlibat dalam pengawasan terhadap penerapan hukum dan menjaga keadilan, Mereka berperan dalam menjaga hak asasi manusia dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, Pendidikan Politik Partai politik dan politisi berperan dalam mendidik masyarakat tentang isu-isu politik dan membangun kesadaran politik, Pendidikan politik membantu masyarakat membuat keputusan yang informasional dan beralasan, Penyelesaian Konflik Politisi dan lembaga politik berperan dalam menyelesaikan konflik politik melalui proses demokratis dan hukum, Mendorong dialog dan negosiasi sebagai alat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, Membentuk Opini Publik Partai politik dan politisi memainkan peran dalam membentuk opini publik melalui kampanye, pidato, dan media, Mereka membantu membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu penting, Pembangunan Institusi Demokrasi Politisi bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan institusi-institusi demokratis, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Inklusivitas Dan Keadilan Politisi harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat diwakili dan memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi, Mendorong inklusivitas dan keadilan dalam partisipasi politik, Pentingnya peran politik dalam sistem

demokrasi menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan praktik-praktik demokratis adalah inti dari kelangsungan dan keberhasilan sistem demokrasi.

Fungsi partai politik mencakup berbagai peran penting dalam sistem politik suatu negara diantaranya ialah 1) Representasi Rakyat yang berarti partai politik bertindak sebagai perantara antara warga negara dan pemerintah, Mereka memperjuangkan kepentingan, nilai, dan aspirasi masyarakat untuk diwakili dalam lembaga legislatif dan eksekutif 2) Mobilisasi Pemilih yang berarti partai politik bertanggung jawab untuk merangsang partisipasi pemilih dalam proses demokrasi, Mereka mengorganisir kampanye politik, mengajak masyarakat untuk memilih, dan memobilisasi dukungan.

Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya sebagai aktor politik tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan dan penggerak perubahan dalam masyarakat.

Parpol Sebagai Faktor Pendukung *Good Governance dan Good Citizen*

Dalam suatu negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi terdapat 3 (tiga) aktor yang memegang peranan penting yang menjadi perantara kepentingan masyarakat yaitu partai politik (*the political parties*), asosiasi kepentingan (*the interest associations*) dan gerakan sosial (*the social movements*) (Anggono, 2020). Fungsi partai politik juga dapat dikategorikan menjadi dua dalam wadah internal organisasi dan eksternal organisasi. Fungsi dari internal organisasi yaitu bahwasannya peran organisasi sangat penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan dan kaderisasi agar partai politik menjadi lebih kuat. Fungsi partai politik yang kedua yaitu eksternal organisasi, dimana organisasi ini berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara agar moral dan etika masyarakat terjaga lebih baik (Susilawati, 2023).

Partai politik memainkan peran unik yang tidak dapat digantikan oleh organisasi lain (Ethan & Harapan, 2020). Peran penting ini menempatkan partai politik di posisi sentral (*political centrality*). Posisi ini memiliki dua aspek: Pertama, setelah berhasil menggabungkan berbagai kepentingan dan nilai dalam masyarakat, partai politik mentransformasikannya menjadi agenda yang dapat dijadikan platform untuk pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak dukungan dari rakyat sehingga partai politik mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya, partai politik harus mampu mempengaruhi proses politik dalam penyusunan undang-undang dan implementasi kebijakan publik tersebut. Kedua, partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional (Meyer, 2012).

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan beserta dengan pembahasannya. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Budaya Patron-Client

Budaya patron-client merujuk pada suatu bentuk hubungan sosial dan politik yang didasarkan pada pertukaran keuntungan dan ketergantungan personal. Dalam konteks ini, "patron" adalah pemberi manfaat atau pelindung, sementara "client" adalah penerima manfaat yang bersedia memberikan dukungan atau loyalitas dalam bentuk tertentu sebagai imbalan. Budaya ini sering ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam politik, ekonomi, dan masyarakat.

Hubungan patron-client didasarkan pada pertukaran keuntungan yang mencakup dukungan politik, pekerjaan, perlindungan, atau sumber daya materi lainnya. Hubungan ini dibangun di sekitar koneksi personal antara patron dan client. Ketergantungan erat pada hubungan interpersonal yang kuat. Kedua pihak saling tergantung satu sama lain. Patron membutuhkan dukungan dan loyalitas dari client, sementara client membutuhkan manfaat atau perlindungan dari patron.

Konsep patron klien berangkat dari konsep Teori Pertukaran Sosial dengan asumsi teori dari George C. Homans bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman (Nastain & Nugroho, 2022). Relasi berdasarkan kesenjangan memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar

kepentingan yang bermuara pada kepentingan materiil, kekuasaan, penghormatan dalam relasi transaksional. Hubungan patron klien tak dapat dilepaskan dari konsep tentang “power” (kuasa). Dalam ini kekuasaan dilakukan dengan persetujuan bawahan, atau setidaknya tanpa keberatan mereka dan tanpa penggunaan kekerasan. Sebagaimana konsep kekuasaan dari Louis Althusser tentang *Ideological State Apparatus*, bahwa hubungan kuasa yang bekerja dengan menerapkan cara-cara “halus” dan terlihat tidak memaksa yang mengejawantah dalam bentuk perangkat pendidikan (guru, dosen, kurikulum) dan perangkat agama (ustadz, pendeta, bhiksu) dapat meminimalkan keberatan masyarakat atas pemegang kekuasaan.

Maczak (2018) menyebut relasi patron klien sebagai “persahabatan yang berpihak” (a lop-sided friendship), yang terdiri dari kata “client” (klien), yang umumnya dikaitkan dengan seseorang yang membeli sesuatu di toko, dan istilah “patron” yang dikaitkan dengan “sang pelindung”. Lebih lanjut Maczak menyebutkan bahwa “patronase” dan “klientelisme” terkait dengan feodalisme yang melibatkan majikan di posisi atas dengan bawahan. Terkait hubungan patron klien ini, Aspinall (2013) dalam (Widoyoko, 2018) mendefinisikan patronase sebagai distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus, sumber daya Materi didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berlandaskan pada hubungan kekuasaan personal. Sedangkan klientelisme diartikan sebagai relasi kekuasaan personal dengan status sosial yang lebih tinggi (patron) dengan mereka yang memiliki status sosial lebih rendah (klien) dalam ikatan timbal balik Hutchcroft (2014) dalam (Widoyoko, 2018).

Patron klien pada awalnya banyak terjadi di pedesaan, sebagaimana disampaikan Hall (2008) mengutip dari Foster (1961), bahwa hubungan patron-klien telah berkembang di daerah pedesaan di mana kepemilikan tanah sangat terkonsentrasi di tangan kelompok yang relatif kecil dan kuat yang mampu memonopoli kekayaan, kekuasaan politik, pendidikan dan sarana komunikasi dengan dunia di luar komunitas pedesaan (Hall Williams Lew Introduction to Companion, n.d.). Foster (1961) dalam (Hall, 2008) menjelaskan sifat hubungan patron-klien yang agak menyebar membuat mereka sulit untuk dikategorikan. Patron-klien memiliki dua karakteristik: pertama, yang didasarkan pada penerimaan terbuka nilai-nilai tradisional oleh pihak yang lebih lemah, yang disebut sebagai patrimonial; dan kedua, yang didasarkan pada bentuk-bentuk represi yang lebih nyata oleh pihak yang lebih kuat karena legitimasi mereka perlahan-lahan berkurang (represif). Sedangkan Scott (1972) dalam (Lukiyanto et al., 2018) menjelaskan pertukaran sosial antara patron klien biasanya terjadi karena status sosial dan ekonomi dan juga kuasa lebih tinggi (patron) kepada individu dengan kemampuan sosial, ekonomi dan kuasa lemah (klien).

Dalam konteks proses politik, relasi patron klien dapat terjadi sesuai dengan karakteristik hubungan itu sendiri. Dalam relasi patron klien, menurut Eisenstadt & Roniger (1984) dalam (Pratama, 2017) patronase adalah relasi yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Sedangkan karakteristik klientelisme dalam relasi patron klien memiliki sifat timbal-balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Patronase dan klientelisme ini terjadi karena hubungan tidak setara namun saling membutuhkan. Proses demokrasi seperti pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah di Indonesia, masih erat kaitannya dengan hubungan patron-klien. Praktik politik patron-klien banyak terjadi pada negara ketiga dengan kualitas demokrasi masih didominasi dengan politik uang dan keistimewaan kalangan tertentu (Muhtadi, 2013).

Praktik patron klien ini bahkan telah terjadi dalam proses demokrasi pemilihan kepala desa. Sebagaimana disampaikan Hall di atas, bahwa patron klien dimulai dari pedesaan, terutama ketika terjadinya feodalisme pemilik tanah dengan para petani pekerja. Penelitian Ramli dalam tulisannya yang berjudul “Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal” (Ramli, 2016) menemukan bahwa dalam pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo, Kabupaten Bulukumba, terjadi praktik politik patron-klien. Hubungan ini terbentuk melalui relasi ekonomi, di mana tokoh masyarakat (patron) yang memiliki kekayaan dan keterampilan dianggap penting kehadirannya oleh masyarakat petani (klien). Para petani sebagai klien merasa terbantu atas bantuan seorang patron, kemudian mereka membalas kebaikan patron dengan cara mengabdikan dirinya pada kepentingan patron, termasuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.

Politik Klientelisme oleh Ramadhan & Oley (2019) ditengarai lekat dengan Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. Dalam penelitiannya mereka menyampaikan terdapat dua faktor yang turut memupuk klientelisme, yaitu belum terpenuhinya hak kewarganegaraan dan tidak berjalannya fungsi representasi. Klientelisme di Indonesia menurut Ramadhan dan Oley dijalankan atas dasar transaksi supply-demand yang

berbasis pada relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu (patron) dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh penyerahan loyalitas oleh penerima (paternalistik). Fenomena patron klien ini disinyalir banyak terjadi dalam proses demokrasi pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah (Umagapi, 2021).

Hubungan Patron-Client dalam Partai Politik

Dalam konteks partai politik, hubungan patron-client menciptakan dinamika khusus di antara pemimpin partai, kader, dan pendukung (Kadir, 2014). Berikut adalah beberapa aspek hubungan patron-client dalam partai politik.

Kepemimpinan Partai Sebagai Patron.

Pemimpin partai, terutama ketua atau pemimpin utama, dapat berfungsi sebagai patron utama. Mereka memiliki kendali dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan partai.

Pertukaran Dukungan Politik

Hubungan ini mencakup pertukaran dukungan politik. Pemimpin partai memberikan dukungan, misalnya, dengan memberikan posisi atau peluang politik kepada kader atau pendukungnya, sementara kader atau pendukung memberikan dukungan dalam bentuk suara, partisipasi, atau kerja keras dalam kampanye.

Penunjukan Jabatan dan Posisi

Pemimpin partai dapat memberikan posisi dan jabatan politik kepada kader atau pendukungnya sebagai bentuk penghargaan atas dukungan mereka. Ini menciptakan loyalitas dan ketergantungan terhadap pemimpin.

Akses ke Sumber Daya

Pemimpin partai memiliki akses terhadap sumber daya partai, seperti dana kampanye, jaringan politik, dan kesempatan politik. Mereka dapat menggunakan sumber daya ini untuk memperkuat hubungan patron-client.

Pola Penerimaan Keputusan Tidak Formal

Keputusan internal partai politik tidak selalu dibuat melalui proses formal atau demokratis. Pemimpin partai, sebagai patron, dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan kebijakan atau calon yang diusung.

Kader dan Pendukung Sebagai Client

Kader partai atau pendukung yang mendapatkan manfaat dari patron disebut sebagai "client." Mereka dapat menerima posisi politik, akses ke sumber daya, atau perlindungan politik dari patron.

Ketergantungan dan Loyalitas

Hubungan ini didasarkan pada ketergantungan dan loyalitas timbal-balik. Patron membutuhkan dukungan client untuk mempertahankan kekuasaan dan otoritas, sementara client membutuhkan patron untuk mendapatkan manfaat politik.

Keseimbangan Kuasa dan Pengaruh

Dalam beberapa kasus, hubungan patron-client dalam partai politik dapat menciptakan keseimbangan kuasa yang tidak seimbang. Pemimpin partai memiliki kendali yang lebih besar, dan hal ini dapat menciptakan dinamika politik yang otoriter.

Dampak Terhadap Demokrasi Internal Partai

Demokrasi internal dalam partai dapat terpengaruh oleh hubungan patron-client. Keputusan-keputusan dapat menjadi sentralistik, dan partisipasi basis dapat dibatasi.

Pengaruh Terhadap Nominasi Calon

Hubungan patron-client dapat memengaruhi proses nominasi calon untuk pemilihan umum. Calon yang memiliki dukungan patron memiliki keuntungan lebih besar.

Potensi Korupsi dan Nepotisme

Dalam situasi ekstrem, hubungan patron-client dapat memicu korupsi dan nepotisme, di mana kebijakan dan keputusan dibuat untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil.

Dampak terhadap stabilitas politik

Hubungan patron-client dalam konteks partai politik dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik suatu negara (Taufiqurrohman, 2020). Dalam beberapa kasus, dampaknya bisa positif, sementara dalam kasus lain, bisa menyebabkan ketidakstabilan. Berikut adalah beberapa dampak umum terhadap stabilitas politik:

Stabilitas Internal Partai

Jika hubungan patron-client dikelola dengan baik, dapat menciptakan stabilitas internal dalam partai politik. Kesetiaan kader dan pendukung kepada patron dapat mengurangi konflik internal yang mungkin terjadi.

Pembagian Sumber Daya yang Tidak Merata

Dalam beberapa kasus, hubungan patron-client dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya dan peluang politik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan anggota partai yang merasa tidak mendapatkan manfaat yang setara.

Stabilitas Politik Jangka Pendek

Hubungan patron-client yang efektif dapat menciptakan stabilitas politik jangka pendek dengan memastikan loyalitas dan dukungan dari anggota partai kunci selama pemilihan atau krisis politik.

Ketidakstabilan Jangka Panjang

Jika hubungan patron-client menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan atau jika terjadi pergeseran kekuasaan yang tiba-tiba, ini dapat menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang dalam partai dan politik nasional.

Korupsi dan Kesenjangan Sosial

Hubungan patron-client yang tidak sehat atau tidak terkendali dapat membuka pintu bagi korupsi dan menciptakan kesenjangan sosial. Ini dapat merugikan stabilitas politik karena merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Kesetaraan dan Inklusivitas

Jika hubungan patron-client menciptakan sistem politik yang tidak inklusif dan tidak memberikan hak yang setara kepada semua anggota masyarakat, ini dapat mengancam stabilitas politik dengan menciptakan ketidakpuasan dan potensi konflik.

Pengaruh Terhadap Kepemimpinan dan Kebijakan

Hubungan patron-client yang dominan dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan beberapa individu atau kelompok kecil. Hal ini bisa merugikan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan dapat mengancam stabilitas politik jangka panjang.

Pengaruh Terhadap Respons Terhadap Tantangan

Partai politik dengan hubungan patron-client yang kuat mungkin kurang responsif terhadap perubahan sosial dan tuntutan masyarakat. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan jika partai tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan sosial.

Kecenderungan Otoritarianisme

Hubungan patron-client yang tidak terkendali dapat menciptakan kecenderungan otoritarianisme di dalam partai politik dan, oleh karena itu, dapat merugikan stabilitas politik yang demokratis.

Analisis temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan patron-client tetap kuat dan memainkan peran sentral dalam strategi politik partai-partai di Indonesia, dinamika tersebut mulai dipengaruhi oleh perubahan sosial dan teknologi. Hubungan yang awalnya bersifat top-down kini menjadi lebih kompleks, dengan

partai-partai beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Namun, ketergantungan pada patron-client terus menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya politik, yang berpotensi menghambat penguatan demokrasi substantif di Indonesia. Meskipun begitu, faktor-faktor seperti globalisasi dan perkembangan teknologi, terutama media sosial, membuka peluang bagi munculnya pola interaksi baru yang lebih transparan dan langsung antara pemilih dan aktor politik, yang dapat mendorong perubahan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkapkan bahwa hubungan antara partai politik dan budaya patron-client di Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks dan terus berubah. Beberapa temuan spesifik dapat diidentifikasi diantaranya, Budaya patron-client masih berperan signifikan dalam dinamika hubungan partai politik dan masyarakat Indonesia. Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan berkontribusi terhadap kelanggangan praktik ini. Dinamika hubungan ini berfluktuasi tergantung pada faktor sistem politik. Sistem yang demokratis cenderung membatasi praktik patron-client, sebaliknya sistem yang tidak demokratis bisa mempermudahnya. Dampak hubungan ini bersifat dua mata pisau. Partisipasi politik meningkat, namun risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme juga ikut naik. Penguatan sistem politik yang demokratis dan pengentasan masalah sosial ekonomi diperlukan untuk memutus siklus negatif budaya patron-client dalam politik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggono, B. D. (2020). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>
- Aspinall, E. (2015). Money politics: Patronage and clientelism in Southeast Asia. *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization*, October 2013, 299–313. <https://doi.org/10.4324/9781315674735-27>
- Bakker, L. (2021). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots, by Edward Aspinall and Mada Sukmajati (eds). *Bijdragen Tot de Taal, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 177(1), 128–130. <https://doi.org/10.1163/22134379-17701002>
- Ethan, A., & Harapan, U. P. (2020). Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia MAKALAH Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia Abraham Ethan M . S . M Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Email : index.abraham@gmail.com. May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11674.26568>
- HallWilliamsLewIntroductiontoCompanion. (n.d.).
- Kadir, A. G. (2014). DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA A. Gau Kadir Staf Pengajar Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan, KM. 10 Makassar, 90245. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132–136.
- Lukiyanto, K., Widita, A., & Kumalasari, R. D. (2018). Patron-client relationship in microenterprise development as a cultural heritage in modern era. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 26(T), 155–162.
- Meyer, T. (2012). Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis. *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 1–46.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id ” Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58.
- Mutawalli, M., Yeyeng, A. T., Balebo, P. M., & Lulo, L. de D. M. (2023). Cancellation of Regional Regulations in Indonesian: An Overview of the Conception of Constitutional Democracy. *Jurnal Politik Profetik*, 11(2), 146–168.
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167–184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>

- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. (2023). Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis. *Japhtn-Han*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>
- Pratama, R. A. (2017). Patronase, Klientalisme Dan Tahta Putra Mahkota Pada Pilkada Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11400>
- Ramli, M. (2016). PATRONASE POLITIK DALAM DEMOKRASI LOKAL (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj . Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba). *Skripsi, Fakultas U(Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar)*, 1–88.
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), 110–123. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>
- Taufiqurrohman, M. M. (2020). Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 9(1), 131. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p12>
- Umagapi, J. L. (2021). Politik Klientelisme di Pemilu Serentak 2019. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11(1), 23–46. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.23-46>
- Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan, Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet. *Integritas*, 4(2), 23.